



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN DAERAH TERTINGGAL, TRANSMIGRASI,
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, DAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN PERTOLONGAN/BASARNAS)**

Tahun Sidang	: 2025 – 2026
Masa Sidang	: III
Rapat	: Ke – 6
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Rabu, 4 Februari 2026
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.32 WIB s.d 13.15 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI.
Acara	: 1. Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 2. Membahas Program Kerja Tahun Anggaran 2026
Ketua Rapat	: Lasarus, S.Sos.,M.Si
Sekretaris	: Nina Herlina, S.H
Hadir Anggota	: dari 48 orang Anggota Komisi V DPR RI.
Hadir Mitra	: Menteri Pekerjaan Umum beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.32.WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum pada hari ini adalah Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dan membahas Program Kerja Tahun Anggaran 2026.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum, atas capaian serapan APBN TA 2025 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI, dimana capaian per 29 Januari 2026 sebagai berikut:

KEMENTERIAN	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK
Kementerian Pekerjaan Umum	95,23 %	95,17 %

2. Komisi V DPR RI mendukung Kementerian Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan Program Prioritas Nasional pada APBN TA 2026, antara lain melalui penyediaan dan peningkatan infrastruktur dasar, infrastruktur jalan, infrastruktur sumber daya air, infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), dan infrastruktur prasarana strategis lainnya, dalam rangka mendukung ketahanan pangan, peningkatan kualitas pelayanan dasar, pemerataan pembangunan wilayah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.
3. Komisi V DPR RI mendorong Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat pelaksanaan Penanganan Bencana TA 2026–2029 melalui penguatan tanggap darurat, serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur terdampak bencana, dan meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah, guna mempercepat pemulihan fungsi pelayanan publik, aktivitas sosial ekonomi, dan ketahanan wilayah secara berkelanjutan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.15.WIB.

Jakarta, 4 Februari 2026

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DODY HANGGODO

KETUA RAPAT,

ttd

L A S A R U S